

# Dampak Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebuah Studi Empiris di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Diana Wijayanti\*, M. Raihansyah

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: [diana.wijayanti@uii.ac.id](mailto:diana.wijayanti@uii.ac.id)

## ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana kualitas sumberdaya manusia di dalam suatu wilayah negara/daerah. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, PDRB, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Temuan ini mengimplikasikan bahwa untuk meningkatkan IPM di Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, pemerintah daerah perlu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan PDRB dan pengeluaran pemerintah. Alokasi anggaran pada sumber daya seperti meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan atau menciptakan kebijakan yang mendorong peningkatan IPM di Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.

**Kata Kunci :** *Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah*

## I. PENDAHULUAN

Sumberdaya manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam perekonomian suatu negara karena SDM yang berkualitas berkontribusi pada pembangunan sosial dan mendukung stabilitas ekonomi. Pembangunan manusia merupakan proses peningkatan aspek kehidupan masyarakat yang merupakan upaya penting dalam mencapai tujuan pembangunan (Laode et al., 2020). Secara mendasar, pembangunan harus mencerminkan transformasi menyeluruh dari suatu masyarakat tanpa mengesampingkan keberagaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok sosial di dalamnya. Pembangunan bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk mendorong kemajuan menuju kehidupan yang lebih baik (Ramadhan, 2019). Salah satu tolak ukur keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam aspek manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendekatan IPM digunakan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) untuk mengklasifikasikan negara berdasarkan kualitas hidup penduduknya yang dipahami secara luas. IPM merupakan ukuran sintesis yang memperhitungkan tiga karakteristik utama pembangunan sosial ekonomi: harapan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Miskiewicz-Nawrocka, 2020).

Beberapa studi menjelaskan kualitas IPM akan berpengaruh secara langsung dan efektif dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran dan ketimpangan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018); (Ramdhani et al., 2022); (Hasibuan, 2023); (Yanthi & Sutrisna, 2021); (Marliana, 2022); (Dinata, 2020); (Saptenno & Maatoke, 2022). Selain itu negara dengan SDM berkualitas tinggi cenderung menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing. Investor lebih tertarik untuk menanamkan modal di tempat yang memiliki tenaga kerja terampil dan terlatih (Astikawati & Sore, 2021). Negara dengan SDM berkualitas tinggi dapat lebih bersaing di pasar global karena dapat menghasilkan barang dan jasa dengan

standar tinggi, yang memungkinkan untuk bersaing dalam hal kualitas dan harga. Beberapa studi yang lain di beberapa wilayah juga menyebutkan bahwa IPM mendorong pertumbuhan ekonomi (Putri et al., 2023); (Tuasela, 2023); (Winarti et al., 2022); (Rorong, 2022); (Mukaromah et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5.05 persen (BPS, 2024). Secara spasial perekonomian Indonesia juga masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen. Sementara tahun 2023 Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,2 persen diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia (BPS Propinsi Riau 2024). Seiring dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan akan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang diukur dengan IPM menunjukkan tahun 2023 mencapai angka 0,713 peringkat 112 dari 193 negara (UNDP). Bahkan pada tingkat ASEAN IPM Indonesia menempati peringkat 6 dibawah negara Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia.

Selama 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77) Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak (BPS, 2024). Pada tahun 2023 dilansir dari Badan Pusat Statistika 10 daerah dengan tingkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (82.46), DI Yogyakarta (81.07), Kalimantan Timur (78.20), Kepulauan Riau (77.11), Bali (77.10), Sulawesi Utara (74.36) Riau (74.04), Banten (73.87), Sumatera Barat (73.75), dan Jawa Barat (73.74). Menjadi salah satu provinsi yang termasuk dalam 10 daerah dengan capaian IPM tertinggi, Riau memiliki sumber daya yang didominasi oleh sumber daya alam minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan itu menjadikan provinsi terkaya di Indonesia. Total luas provinsi Riau adalah 87.023,66 km<sup>2</sup>. Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelelawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Pekanbaru, dan Dumai.

Peran penting IPM terhadap perekonomian sebuah negara menyebabkan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia menjadi sebuah keharusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah penilaian global pembangunan manusia berdasarkan harapan hidup, pendidikan, literasi, dan PDB per kapita. Beberapa faktor pendorong peningkatan IPM diantaranya adalah produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita dan tingkat pembangunan sosial ekonomi (Yumashev et al., 2020). Studi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan, dana alokasi umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi terhadap berpengaruh IPM (Regina et al., 2020). Perangkat kebijakan fiskal dan indikator ekonomi makro terpilih seperti inflasi, rasio investasi modal tetap, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup di 34 negara OECD untuk periode 2000-2018 (Vicil & Konukman, 2022). Dampak inklusi keuangan terhadap HDI di 105 negara; pendapatan per kapita dan pembangunan gender juga dibandingkan di seluruh negara BRICS. Studi tersebut menemukan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan manusia secara umum (Pandey, 2023). Penelitian di 25 negara OKI dari tahun 2010-2019 menunjukkan pengaruh kesehatan, pendidikan, dan angkatan kerja yang dimoderasi oleh penduduk perkotaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Fauziana & Ratnasari, 2023). **Kebaharuan dan kontribusi** dari penelitian ini adalah menawarkan kontribusi baru terhadap literatur akademik dengan menyediakan analisis empiris terbaru yang menghubungkan variabel-variabel makroekonomi dengan IPM di konteks lokal yang spesifik yaitu di propinsi Riau. Secara keseluruhan, studi ini penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi dan sosial berinteraksi untuk mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Riau, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada. Pembangunan sebagai proses yang memperluas entitlement dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai

dengan yang diinginkannya. Sumber daya manusia (human resources) dari suatu bangsa, tidak dinilai dari modal fisik ataupun sumber daya material yang dimilikinya tapi dilihat dari faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan social dan ekonomi bangsa tersebut. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan patron pembangunan dengan perspektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total dan menyeluruh. Karena tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami diminishing return tapi hal tersebut tidak berlaku pada ilmu pengetahuan (Kuncoro, 1997). Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), Untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Sejak tahun 1990 UNDP mulai melakukan penelitian pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human development Index). Pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga aspek yaitu harapan hidup yang panjang (*life expectancy*), angka melek huruf (*literacy rate*), dan standar hidup (*standard of living*). Setiap aspek diwakili oleh masing-masing indikator seperti harapan hidup yang panjang dibentuk dari angka harapan hidup pada saat lahir, aspek angka melek huruf diwakili oleh angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan angka pengeluaran perkapita mewakili aspek standar hidup yang layak.

### III. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Riau dalam Angka dan DJPK Kemenkeu. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2018-2023. Data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dengan data *cross-section*, yang memiliki keuntungan yakni penggabungan data menyebabkan data penelitian lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang besar (Agus, 2009). Dalam studi ini variabel terikatnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel bebasnya adalah kemiskinan, PDRB, pengangguran dan pengeluaran pemerintah.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	poin	Ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, meliputi dimensi Kesehatan, Pendidikan dan kemampuan hidup layak. umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Di Kabupaten/Kota provinsi Riau.
Tingkat Kemiskinan	MSK	Persen	Prosentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, baik dalam hal makanan maupun kebutuhan non-makanan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	Milyar Rp	Sejumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tingkat Pengangguran	PENG	Persen	Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha atau

			belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Tingkat pengangguran merujuk pada angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum bekerja.
Pengeluaran Pemerintah	PP	Milyar Rp	Pengeluaran pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode tertentu

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Persamaan model penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- X<sub>1</sub> = Tingkat kemiskinan
- X<sub>2</sub> = PDRB
- X<sub>3</sub> = Tingkat pengangguran
- X<sub>4</sub> = Pengeluaran Pemerintah
- β<sub>0</sub> = Konstanta
- β<sub>1,2,3</sub> = Koefisien
- ε = error
- i = *Cross Section* (Kab/Kota)
- t = Time Series (Tahun)

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan model terbaik, dilakukan uji Chow dan uji Hausman sebagaimana tabel dibawah:

**Tabel 2. Uji CEM, Uji FEM, Uji REM**

Variabel	Random Effect Model (REM)		Fixed Effect Model (FEM)		Common Effect Model (CEM)	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	69.07517	0.0000	68.91728	0.0000	71.24472	0.0000
X1	-0.320244	0.0000	-0.336866	0.0000	-0.272101	0.0001
X2	9.96E-05	0.0000	0.000106	0.0002	2.55E-05	0.5781
X3	-3.33E-05	0.0325	3.18E-05	0.0697	0.000213	0.0000
X4	0.000897	0.0002	0.000905	0.0002	-0.000570	0.5714
R-squared	0.726249		0.994708		0.654399	
F-statistic	44.43707		701.6732		31.71625	
Prob.F-stat	0.000000		0.000000		0.000000	
Observ	72		72		72	

Berdasarkan table 2 diatas, dilakukan uji chow untuk menentukan model terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hasil uji chow dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	327.349181	(11.56)	0.0000

<i>Cross-Section Chi-Square</i>	300.888234	11	0.0000
---------------------------------	------------	----	--------

Berdasarkan hasil pengujian uji chow dihasilkan nilai probabilitas F-statistik sebesar  $0.0000 < 0.05 \alpha$  (5%) yang artinya menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan didapatkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat jika dibandingkan dengan model *common effect*. Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect* dan *common effect*. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada table 4.

**Tabel 4. Uji Hausman**

<b>Effect Test</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>Chi-Sq. d.f.</b>	<b>Prob.</b>
<i>Cross-Section random</i>	9.986961	4	0.0406

Berdasarkan hasil pengujian uji hausman dihasilkan nilai probabilitas *chi-square* sebesar  $0.0406 < 0.05 \alpha$  (5%) yang artinya menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan didapatkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat jika dibandingkan dengan mo Hasil pengujian regresi data panel yang telah dilakukan dengan pengujian uji chow dan uji hausman menunjukkan hasil model terbaik adalah *fixed effect* (FEM). Hasil dari estimasi model *fixed effect* adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Model Terbaik *Fixed Effect Model***

<b>Variabel</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	68.91728	1.421001	48.49909	0.0000
X1	-0.336866	0.069310	-4.860248	0.0000
X2	0.000106	2.63E-05	4.023142	0.0002
X3	-3.18E-05	1.72E-05	-1.849044	0.0697
X4	0.000905	0.000230	3.929978	0.0002
<i>Weight Statistics</i>				
R-Squared	0.994708	Mean dependent var	71.93778	
Adjusted R-squared	0.993290	S.D. dependent var	3.994425	
S.E. of regresision	0.327204	Sum squared resid	5.995484	
F-statistic	701.6732	Durbin-Watson stat	1.451684	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Dari hasil estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan diatas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$$Y = 68.91728 - 0.336866X_1 + 0.000106X_2 - 3.18E-05X_3 + 0.000905X_4$$

Keterangan:

- Y = Indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau
- X1 = Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau
- X2 = PDRB di Provinsi Riau
- X3 = Tingkat pengangguran di Provinsi Riau
- X4 = Pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau

Model terbaik dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Pada tabel diatas nilai F-statistik 701,6732 dengan probabilitas F sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0,05 (5%) berarti variabel independen (tingkat kemiskinan, PDRB, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Riau ) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (IPM). Selanjutnya hasil olah

data tersebut mendapatkan pula nilai koefisien determinasi yakni 0.994708 atau terdapat 99,47% IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dipengaruhi oleh perubahan dari empat variabel independent yakni tingkat kemiskinan, PDRB, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah. Sementara 0.57% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian yang tidak digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kemiskinan terkait dengan keterbatasan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menurunkan akses terhadap kesehatan yang berkualitas serta pendidikan yang memadai. Tingkat kemiskinan yang tinggi membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan transportasi. Pendapatan yang rendah juga mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan, yang berdampak negatif pada IPM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh secara langsung terhadap IPM (**Regina et al., 2020**). Demikian juga jika tingkat pengangguran meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung turun karena pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan bagi masyarakat, yang membatasi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan layanan kesehatan. Pendapatan yang lebih rendah berdampak negatif pada kualitas hidup dan komponen IPM, sebagaimana temuan dari **Kiha et al., 2021**. Hal ini berbeda dengan temuan dari **Tumbuan et al., 2023**, penelitian yang dilakukan di Manado, menjelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap IPM. Semakin tinggi PDRB yang dihasilkan oleh wilayah akan berdampak pada kenaikan IPM. Secara keseluruhan, kenaikan PDRB berhubungan dengan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi dan akses ke layanan penting, yang mendukung peningkatan IPM. Demikian juga dengan kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong kenaikan IPM (**Izzah & Hendarti, 2021**); (**Suhendi & Astuti, 2023**); (**Nailufar et al., 2024**).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran akan menurunkan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kemiskinan dan pengangguran mengakibatkan menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan sehingga akan menurunkan IPM. Sedangkan PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kenaikan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. PDRB dan pengeluaran pemerintah mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam kualitas hidup masyarakat. PDRB yang tinggi menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita, memberikan masyarakat akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, peningkatan PDRB dan pengeluaran pemerintah dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perkembangan manusia, yang tercermin dalam IPM yang lebih tinggi.

Dengan menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Kabupaten/Kota di propinsi Riau periode 2018-2023, penelitian ini dapat menguji dan mengkonfirmasi teori-teori pembangunan yang ada, serta menghasilkan model yang lebih akurat untuk menggambarkan dinamika sosial-ekonomi di Kabupaten/Kota di propinsi Riau. Selain itu menjadi masukan bagi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi Riau dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang mendorong peningkatan IPM. Temuan riset ini juga dapat menjadi dasar bagi intervensi sosial dan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

## Referensi

- Agus, W. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Astikawati, Y., & Sore, A. D. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Investasi Asing di Indonesia. *Pacioli: Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan*, 1(1), 15–21.
- Dinata, S. R. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 116–137.
- Fauziana, H., & Ratnasari, R. T. (2023). The Effect of Health, Education, and Labor Force with Urban Population As Moderating Variables on Human Development Index in Oic Member Countries. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1).
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2, 99–106.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di kabupaten belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. (No Title).
- Laode, M., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02).
- Marliana, L. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87–91.
- Miskiewicz-Nawrocka, M. (2020). The Application Of The Hdi Index To Assess The Socio-Economic Development Of The Eu Countries In 1990-2018. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 269–280.
- Mukaromah, L., Hanifatuzzahra, Z., Nasrullah, A., Latifah, T. M., Purwaningsih, V. T., & Suparta, I. W. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022. *ANALISIS*, 13(2), 228–245.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, M., & Risna, R. (2024). Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump), Penanaman Modal Asing (Pma), Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Iindonesia (Studi Kasus 11 Provinsi Ipm Lower Medium). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 11–21.
- Pandey, T. D. (2023). Impact of Financial Inclusion on Human Development Index: Special Reference to BRICS Countries. *BRICS Journal of Economics*, 4(2), 209–223.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F., & Desmawan, D. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 64–70.
- Ramadhan, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di 5 Kota Besar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2017.
- Ramdhani, N., Anggraeni, Y., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 136–144.
- Regina, R., Sinring, B., & Hamid, M. (2020). Analysis the Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (HDI) in Indonesia. *Jurnal Economic Resources*, 3(2), 1–12.

- Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(3), 398–415.
- Saptenno, F., & Maatoke, C. K. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 16(1), 41–49.
- Suhendi, S., & Astuti, I. P. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pdrb Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Ipm Di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1676–1694.
- Tuasela, A. (2023). Systematic Literature Review: Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 392–398.
- Tumbuan, C. C. G., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 121–132.
- VICIL, E., & KONUKMAN, A. (2022). The Effect of Fiscal Policy and Selected Macroeconomic Indicators on Human Development Index: The Case for OECD Countries. *Ekonomik Yaklasim*, 33(123), 227–227.
- Winarti, V. P., Erliantari, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2017–2021. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 155–163.
- Yanthi, N., & Sutrisna, I. K. (2021). Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana*, 10(5), 1774–2222.
- Yumashev, A., Ślusarczyk, B., Kondrashev, S., & Mikhaylov, A. (2020). Global indicators of sustainable development: Evaluation of the influence of the human development index on consumption and quality of energy. *Energies*, 13(11), 2768.